

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penerapan sistem otonomi daerah di Indonesia memberi ruang kepada pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahannya secara lebih independen sesuai ketentuan dan peraturan dalam sektor pemerintahan yang berlaku. Diberlakukannya sistem akuntansi dalam sektor pemerintah turut mendorong terciptanya tata kelola pemerintah daerah yang adil dan transparan. Kesadaran akan pentingnya penerapan akuntansi dalam sektor pemerintahan mulai timbul pasca terjadinya krisis moneter di era 1997 yang menuntut untuk adanya pertanggungjawaban anggaran dalam sektor pemerintahan (Zelmiyanti, 2015). Seiring berkembangnya akuntansi dalam sektor pemerintah saat ini, maka pertanggungjawaban kepada pihak-pihak berkepentingan menjadi sebuah kewajiban dan tuntutan yang harus dipenuhi. Jensen dan Meckling (1976) (dalam Kulumata, Ilat dan Warongan, 2016) menjelaskan relasi antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*) yaitu dalam operasionalnya *agent* mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada *principal*. Dalam sektor pemerintahan, pemerintah daerah bertindak sebagai agen yang berkewajiban memberikan pertanggungjawaban atas kinerjanya kepada *principal* yakni kepada struktur pemerintahan yang lebih tinggi dan kepada masyarakat.

Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan empat kriteria yang menjadikan laporan keuangan berkualitas yaitu relevan, handal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah setiap tahunnya diperiksa dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kemudian diberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan tersebut. Audit dilakukan sebanyak dua kali yaitu audit pendahuluan dan audit terinci. Audit pendahuluan dilaksanakan pada bulan Februari atau Maret dalam jangka waktu 30 hari. Sementara audit terinci dilaksanakan pada bulan April sampai Juni dalam jangka waktu 40 hari. Audit pendahuluan dilakukan sebelum Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

diserahkan ke BPK untuk di audit. Dalam audit pendahuluan, yang menjadi objek penelitian tidak mencakup seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di suatu daerah, namun hanya mengambil beberapa SKPD saja untuk dijadikan sampel. Sedangkan audit terinci dilaksanakan di semua SKPD di suatu daerah dan dilakukan setelah penyerahan LKPD oleh pemerintah daerah kepada BPK untuk diaudit, untuk kemudian menghasilkan LKPD *audited* dengan opini hasil pemeriksaan BPK.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahmadani (2015) pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Pasamaan Barat ditemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntanansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Pasamaan Barat. Sementara variabel lain diteliti oleh Toban dan Kurniawan (2017) pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Toraja Utara yang menemukan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sementara penelitian lainnya dilakukan oleh Ihsanti (2014) pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Lima Puluh Kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Rahmadani (2015) terkait pengaruh variabel sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas lapoan keuangan daerah. Hasil penelitian berbeda juga ditemukan oleh Kulumata, Ilat, dan Warongan (2016) yang menemukan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Berdasarkan data yang diunggah oleh Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nusa Tenggara Timur pada halaman website Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nusa Tenggara Timur (<http://kupang.bpk.go.id/>), ditemukan bahwa sejak tahun 2015 sampai 2017, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Manggarai Timur selalu mendapat opini wajar dengan pengecualian

(*qualified opinion*), yang berarti bahwa masih ada pos dan akun dalam LKPD Kabupaten Manggarai Timur yang belum disajikan secara wajar. Pada tahun 2015 hal yang dikecualikan antara lain: 1) Persediaan, 2) Aset Tetap, antara lain inventarisasi dan penilaian aset tetap belum menyeluruh; 3) Piutang pajak, yaitu belum dilakukan penyisihan nilai piutang; 4) Penerimaan dan Pengeluaran BLUD SPAM belum disajikan dan diungkapkan memadai dalam laporan keuangan; dan 5) Penerimaan dan pengeluaran dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum disajikan dan diungkapkan memadai dalam laporan keuangan. Kemudian pada Tahun 2016 hal yang dikecualikan ialah terkait aset daerah dan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Selanjutnya pada Tahun 2017 hal yang dikecualikan ialah aset tetap yakni terdapat kelemahan pengendalian intern yang signifikan atas proses penatausahaan dan penyajian aset tetap yaitu adanya selisih jumlah aset tetap dalam daftar inventaris barang dengan jumlah fisik barang-barang tersebut.

Dari hasil pemeriksaan BPK tersebut, terlihat bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Manggarai Timur belum disajikan secara wajar dan berkualitas karena masih ada beberapa akun dan pos yang masih belum disajikan secara wajar. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Pertama ialah terkait faktor kompetensi sumber daya manusia. Menurut Ihsanti (2014), laporan keuangan seharusnya disusun oleh individu yang berasal dari bidang ilmu akuntansi yang secara latar belakang pendidikan dan kompetensi akan lebih memahami kaidah penyusunan laporan keuangan yang baik dan benar. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia masih terus diusahakan di Kabupaten Manggarai Timur. Rotasi, mutasi, dan promosi akan terus dilakukan guna penyesuaian personil dalam organisasi birokrasi untuk bisa terus melakukan regenerasi dan penyediaan kompetensi sumber daya manusia yang baik (Ninu, 2017).

Kedua ialah pemanfaatan teknologi informasi. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan baik, kesalahan-kesalahan teknis dalam penyusunan laporan keuangan akan lebih diminimalisir. Terkait pemanfaatan teknologi

informasi di Kabupaten Manggarai Timur, Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur melalui Dinas Informasi dan Komunikasi sedang gencar menerapkan program jaringan internet dan telkomsel (*based transfer station*) yang menyebar di sembilan kecamatan di wilayah Manggarai Timur. Program ini telah dilaksanakan sejak Tahun 2017 dan dalam rancangannya akan tersebar di 15 lokasi di sembilan kecamatan di Kabupaten Manggarai Timur (Hona, 2017). Ketiga ialah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Ihsanti (2014) menemukan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD, tetapi menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahmadani (2015), ditemukan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait pengaruh variabel sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Pemberian opini wajar dengan pengecualian dari BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Manggarai Timur untuk tahun anggaran 2015, 2016, dan 2017 dilandasi oleh adanya kelemahan dalam penyajian laporan keuangan daerah tersebut, yaitu adanya pos atau akun dalam laporan keuangan daerah yang belum disajikan secara wajar. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor. Diantaranya yang dijadikan variabel independen peneliti dalam penelitian ini yaitu terkait kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. Selain itu, adanya perbedaan hasil penelitian antara peneliti-peneliti terdahulu juga menjadi suatu hal yang perlu dikaji lebih lanjut. Berdasarkan beberapa penjabaran dan alasan di atas, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Manggarai Timur.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti dapat menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Manggarai Timur?
- b. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Manggarai Timur?
- c. Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Manggarai Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Manggarai Timur.
- b. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Manggarai Timur.
- c. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Manggarai Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penelitian selanjutnya yang fokus pada pengaruh variabel kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

1.4.2 Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi daerah Kabupaten Manggarai Timur yang menjadi objek penelitian untuk menjadi acuan dalam pengambilan keputusan terkait pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan landasan teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan model penelitian.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, pengukuran variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel, teknik penyampelan, dan analisis data.

BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, hasil analisis data, dan pembahasan.

BAB 5: SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Dalam bab ini berisikan tentang simpulan, keterbatasan dan saran.